



Strategi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri pada Studi Kasus Evakuasi Korban TPPO di Myawaddy, Myanmar Tahun 2025

Ucok Pramona^{*1}, Hartanto², Sunarto Eko Wahyudi³

^{1,2,3}Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: ucokpramona@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2026-03-07 Revised: 2026-04-13 Published: 2026-05-03 Keywords: MOOTW; Citizen Protection; TPPO; Defense Diplomacy.	The protection of Indonesian citizens (WNI) abroad is a constitutional mandate that requires synergy between diplomacy and defense instruments. This study aims to analyze the strategy of Military Operations Other Than War (MOOTW/OMSP) in the repatriation process of 554 Indonesian victims of Human Trafficking (TPPO) in Myawaddy, Myanmar, in March 2025. The methodology used is qualitative descriptive with a case study approach. The results indicate that the success of this operation was determined by the integration of the Ends, Ways, and Means model involving cross-sectoral coordination between the Ministry of Foreign Affairs, the Indonesian National Armed Forces (TNI), and partner country authorities (Thailand and Myanmar). The study concludes that strengthening MOOTW doctrine and defense diplomacy is key to the effectiveness of non-combatant evacuation operations in conflict areas. This operation successfully mitigated safety risks without triggering military escalation, making it an essential reference for future citizen protection protocols.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2026-03-07 Direvisi: 2026-04-13 Dipublikasi: 2026-05-03 Kata kunci: OMSP; Perlindungan WNI; TPPO; Diplomasi Pertahanan.	Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri merupakan mandat konstitusional yang menuntut sinergi antara instrumen diplomasi dan pertahanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam proses pemulangan 554 WNI korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Myawaddy, Myanmar, pada Maret 2025. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan operasi ini ditentukan oleh integrasi model Ends, Ways, dan Means yang melibatkan koordinasi lintas sektoral antara Kementerian Luar Negeri, TNI, dan otoritas negara mitra (Thailand dan Myanmar). Kesimpulan penelitian menekankan bahwa penguatan doktrin OMSP dan diplomasi pertahanan merupakan kunci efektivitas evakuasi non-kombatan di wilayah konflik. Operasi ini berhasil memitigasi risiko keselamatan tanpa memicu eskalasi militer, menjadikannya referensi penting bagi protokol perlindungan warga negara di masa depan.

I. PENDAHULUAN

Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia di luar negeri bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan mandat konstitusional yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam dinamika geopolitik global yang semakin kompleks, ancaman terhadap WNI tidak lagi terbatas pada bencana alam atau perang konvensional, namun meluas ke ranah kejahatan lintas negara seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berbasis *online scam*. Kasus tertahannya 554 WNI di Myawaddy, Myanmar, pada awal tahun 2025 menjadi titik krusial yang menguji kesiapan instrumen negara dalam melakukan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Myawaddy, sebagai zona konflik yang dikuasai kelompok bersenjata, menyajikan tantangan aksesibilitas dan risiko keamanan tinggi yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui jalur diplomatik murni. Oleh karena itu,

keterlibatan TNI dalam mendukung kebijakan politik luar negeri menjadi sebuah keniscayaan guna menjamin keselamatan jiwa warga negara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas operasi pemulangan tersebut melalui kacamata strategi pertahanan dan koordinasi antarlembaga. Kerangka teori yang digunakan dalam artikel ini bersandar pada konsep OMSP sebagaimana diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya pada fungsi membantu tugas pemerintahan di daerah dalam kerangka bantuan kemanusiaan dan perlindungan warga negara. Selain itu, digunakan pendekatan strategi militer *Ends, Ways, and Means* oleh Arthur F. Lykke untuk membedah bagaimana tujuan strategis (keselamatan WNI) dicapai melalui cara-cara diplomatik-operasional dan penggunaan sumber daya yang tersedia. Konsep *Duty of Care* juga menjadi landasan *moral-legal* yang mewajibkan negara hadir dalam

setiap situasi krisis yang menimpa warganya di yurisdiksi asing. Organisasi penulisan ini disusun mulai dari pemaparan metodologi, hasil penelitian berupa tahapan evakuasi, pembahasan mendalam mengenai sinergi lintas sektoral, hingga simpulan strategis bagi pengembangan doktrin pertahanan maritim dan darat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian difokuskan pada koridor evakuasi Myawaddy (Myanmar) – Mae Sot (Thailand) – Bangkok – Jakarta. Data dikumpulkan melalui telaah dokumen operasional, laporan kebijakan perlindungan WNI, dan analisis literatur terkait operasi evakuasi non-kombatan (NEO). Tahapan penelitian meliputi:

1. Tahap Identifikasi: Pemetaan jumlah dan lokasi korban di wilayah konflik;
2. Tahap Analisis Strategis: Penentuan jalur evakuasi dan koordinasi multilateral;
3. Tahap Evaluasi: Penilaian keberhasilan repatriasi.
4. Teknik analisis data menggunakan reduksi data dan triangulasi sumber untuk memastikan validitas narasi operasional yang disusun.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Data menunjukkan bahwa operasi evakuasi dilaksanakan dalam dua gelombang besar dengan total 554 WNI. Keberhasilan operasi ini dapat diringkas dalam tabel tahapan operasional berikut:

Tabel 1. Identifikasi Variabel Kompetensi dalam Studi Kasus Evakuasi

Fase Operasi	Aktivitas Utama	Fase Operasi	Aktivitas Utama
Konsolidasi	Pendataan & Verifikasi korban di kamp Myawaddy	Konsolidasi	Pendataan & Verifikasi korban di kamp Myawaddy
Mobilisasi	Penarikan jalur darat Myawaddy ke Mae Sot	Mobilisasi	Penarikan jalur darat Myawaddy ke Mae Sot
Transit	Pengaman-an di Bangkok & Screening dokumen	Transit	Pengaman-an di Bangkok & Screening dokumen
Repatriasi	Penerbang-an Bangkok ke Jakarta (2 Gelombang)	Repatriasi	Penerbang-an Bangkok ke Jakarta (2 Gelombang)

Sumber: Diolah oleh penulis, (2026)

Secara teknis, penggunaan jalur darat menuju Thailand dipilih karena pertimbangan keamanan udara di wilayah konflik Myanmar yang tidak menentu. Hal ini menunjukkan adaptabilitas strategi lapangan yang sangat tinggi dalam merespons dinamika di zona abu-abu (*grey zone*).

B. Pembahasan

Pembahasan mengenai operasi ini menitik-beratkan pada integrasi antara diplomasi dan aksi operasional. Dalam perspektif *Ends, Ways, and Means*, tujuan (*Ends*) untuk menyelamatkan 554 nyawa dicapai melalui cara (*Ways*) "operasi senyap" yang mengedepankan negosiasi tingkat tinggi dengan kelompok-kelompok lokal dan pemerintah Thailand sebagai negara transit. Penggunaan sumber daya (*Means*) tidak hanya terbatas pada anggaran negara, tetapi juga pemanfaatan jaringan intelijen dan atase pertahanan yang memiliki akses ke pemangku kepentingan keamanan di wilayah perbatasan.

Keberhasilan ini juga menunjukkan bahwa OMSP dalam konteks perlindungan WNI tidak selalu harus ditampilkan dalam bentuk unjuk kekuatan militer (*show of force*), melainkan melalui dukungan logistik, pengamanan koridor, dan diplomasi pertahanan yang proaktif. Peran TNI, khususnya TNI Angkatan Laut dalam jangka panjang, sangat strategis dalam memetakan rute-rute evakuasi maritim jika krisis serupa terjadi di wilayah kepulauan atau negara dengan akses laut yang lebih dominan. Sinergi antara Kementerian Luar Negeri sebagai *lead sector* diplomasi dengan TNI sebagai pendukung kekuatan fisik menciptakan efek penggentar bagi aktor-aktor TPPO, sekaligus memberikan rasa aman bagi warga negara. Tantangan koordinasi lintas negara dapat dimitigasi melalui perjanjian kerja sama keamanan bilateral yang lebih teknis terkait penanganan korban kejahatan lintas negara.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Operasi evakuasi 554 WNI di Myawaddy pada Maret 2025 merupakan bukti keberhasilan implementasi OMSP yang terukur dan terintegrasi. Sinergi antara instrumen diplomasi (Kementerian Luar Negeri) dan instrumen pertahanan (TNI) dalam kerangka perlindungan warga negara terbukti efektif dalam menghadapi ancaman non-tradisional

seperti TPPO di wilayah konflik. Keberhasilan penggunaan jalur darat lintas batas menunjukkan pentingnya fleksibilitas operasional dan penguatan kerja sama regional dengan negara tetangga. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya penguatan doktrin evakuasi non-kombatan yang lebih standar dan teruji untuk menghadapi krisis di masa depan. Meskipun operasi ini berhasil, ketergantungan pada izin transit negara ketiga menunjukkan bahwa diplomasi pertahanan harus terus ditingkatkan sebagai langkah preventif dan mitigatif.

B. Saran

Disarankan bagi pemerintah dan institusi pertahanan untuk menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu yang melibatkan kementerian lintas sektoral untuk percepatan respons krisis WNI di luar negeri. Selain itu, diperlukan peningkatan kapasitas intelijen teritorial dan atase pertahanan di kawasan-kawasan rawan konflik guna memastikan deteksi dini terhadap potensi kejahatan lintas negara yang menasar warga negara Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

Anwar, D. F. (2020). *Indonesia's Foreign Policy and Citizen Protection in Conflict Zones*. Jakarta: LP3ES.

Creswell, J. W. dan Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. 4th edn. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Kementerian Luar Negeri RI. (2018). *Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri*. Jakarta: Kemenlu.

Lykke, A. F. (1989). 'Toward an Understanding of Military Strategy', dalam *Military Strategy: Theory and Application*. Carlisle Barracks: U.S. Army War College, pp. 3-8.

Smith, J. (2021). 'Non-combatant Evacuation Operations in Volatile Environments', *Journal of Defense and Security Analysis*, 37(2), pp. 145-160.

Till, G. (2022). *Seapower: A Guide for the Twenty-First Century*. 5th edn. London: Routledge.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

UNODC. (2023). *Global Report on Trafficking in Persons: Focus on Southeast Asia*. Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.